



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66



RENCANA STRATEGIS

TH. 2025 - 2029

Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Gresik

Kabupaten
Gresik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tumbuh seimbang, berkeadilan gender, dan ramah anak.

Penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui proses yang partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga mitra. Dengan demikian, Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan pembangunan di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan Pelindungan anak di Kabupaten Gresik secara efektif dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman yang jelas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah menuju Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Gresik, 11 September 2025
Kepala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kab.Gresik



dr. Titik Ernawati, M.H.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19760903 200701 2 010

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelindungan Anak	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	51
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
3.1. Tujuan dan Sasaran	57
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	61
3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	63
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
4.1. Rumusan Program Renstra Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 s.d. 2029	66
4.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Th 2025-2029	131
4.3. Rencana Pendanaan Program / Kegiatan. Sub Kegiatan	136
4.4. Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029;	168
4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	185
4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	186
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 –2030	188
Bab V Penutup	189

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Berstatus Aparatur Sipil Negara perJabatan
- Tabel 2.2. Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Berstatus Non Aparatur Sipil Negara
- Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2021 s.d. 2024;
- Tabel 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 s.d. 2029
- Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 s.d. 2029
- Tabel 3.3 Arah dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 s.d. 2029
- Tabel 4.1 Rencana Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 s.d. 2029
- Tabel 4.2 Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- Tabel 4.3 Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- Tabel 4.4 Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional
- Tabel 4.5. Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita
- Tabel 4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 –2030
- Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 –2030

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

BAB I PENDAHULUAN

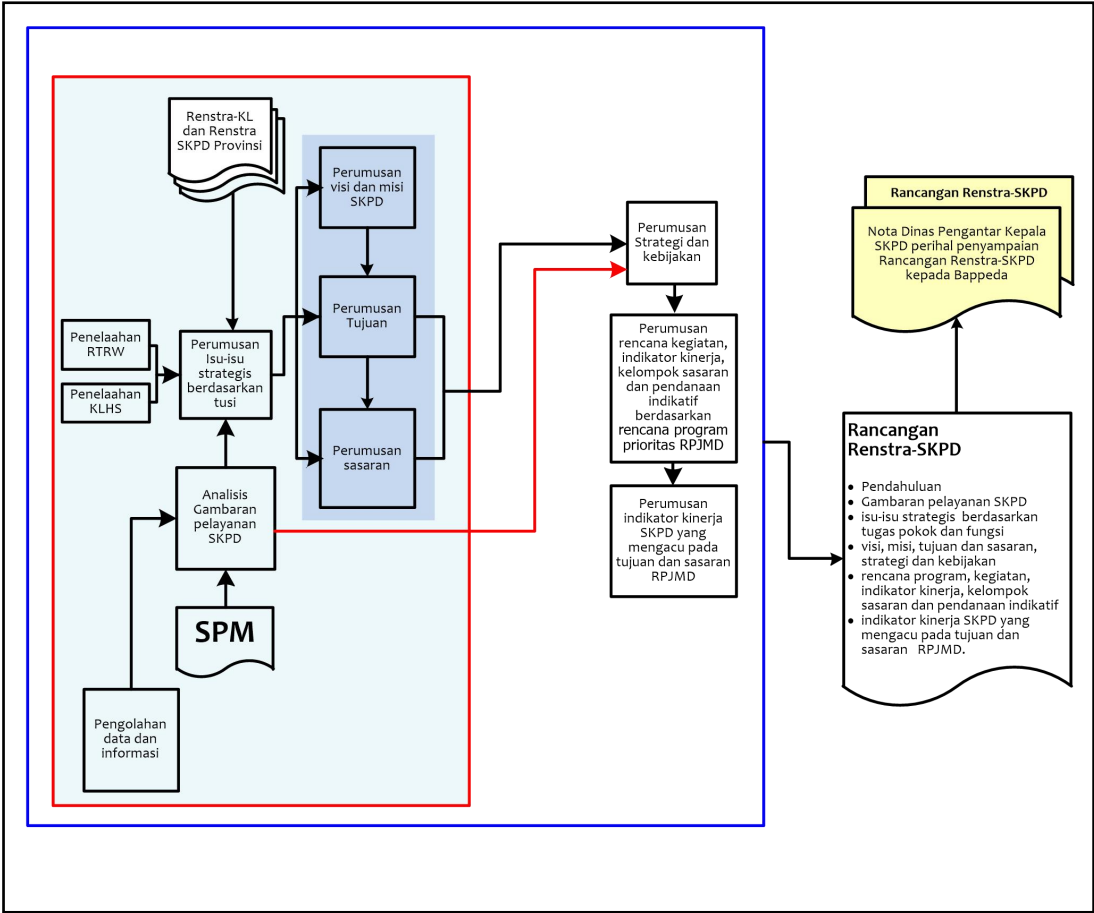
1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Peraturan Bupati Gresik tentang Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Gresik, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gresik.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir pada Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 219 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 No. 6)
23. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik) Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48)
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
25. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

5.1 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab III ini memaparkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan program Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Bab ini menjelaskan hasil yang ingin dicapai, target operasional yang spesifik, pendekatan dan metode yang digunakan, serta pedoman umum dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab ini bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, target kinerja yang diharapkan, pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, serta estimasi pendanaan yang diperlukan, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan akuntabel sesuai dengan prioritas pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

BAB II

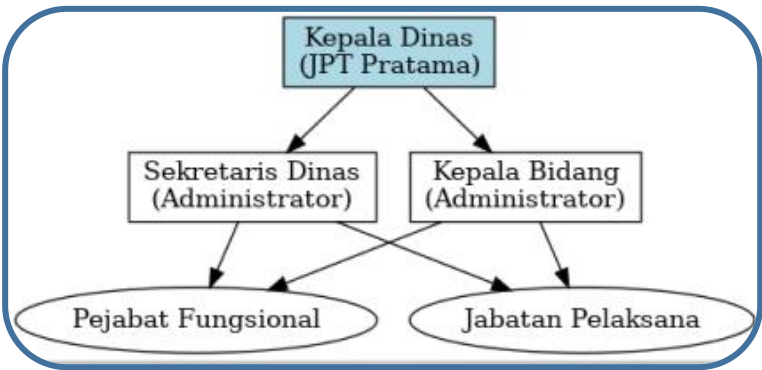
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dasar hukum penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas KBPPPA saat ini berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024. Peraturan ini tidak lagi mengatur struktur organisasi secara rinci, melainkan memberikan kerangka umum tata kerja pasca penyederhanaan birokrasi, yang menegaskan kedudukan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, serta Jabatan Fungsional dan Pelaksana dalam sistem kerja perangkat daerah. Dengan demikian, Dinas KBPPPA tetap melaksanakan fungsi pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan mengacu pada prinsip penyederhanaan birokrasi, yakni efektif, efisien, kolaboratif, transparan, akuntabel, serta berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sambil menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan struktur organisasi secara spesifik.

Di Perbup 23/2024, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan untuk menggunakan model struktur 2 level hasil penyederhanaan birokrasi, dengan struktur sebagaimana Gambar 2.1. Struktur Level 2 berikut:



Gambar 2.1. Struktur Level 2

Adapun struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik masih menggunakan Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena belum ada aturan baru yang menetapkan struktur penggantinya. Struktur organisasi tersebut sebagaimana Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah ini.

Gambar 2.2 Struktur organisasi organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



Sejalan dengan hal tersebut, dasar hukum pendirian Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) diatur melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat konsultasi tertulis dari Gubernur Jawa Timur sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

Berdasarkan Perbup tersebut, UPT PPA merupakan UPT Kelas B yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KBPPPA. Susunan organisasinya terdiri dari:

- Kepala UPT yang memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- Jabatan Pelaksana yang menjalankan kegiatan teknis operasional sesuai dengan analisa jabatan dan beban kerja;
- Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan layanan sesuai bidang keahlian profesional (antara lain pekerja sosial, konselor, maupun psikolog).

Dengan adanya dasar hukum ini, keberadaan UPT PPA memperkuat sistem layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan penyelenggaraan tugas berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan penyederhanaan birokrasi.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Yang Berstatus Aparatur Sipil Negara

	Jabatan	Eselon IV / Setara	Jumlah SDM
1	Kepala Dinas	II	1
2	Sekretaris Dinas	IIIb	-
3	Ka. Bid Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	IIIa	1
4	Ka. Bid Keluarga Sejahtera dan Advokasi	IIIa	1
5	Ka. Bid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	IIIa	1

	Jabatan	Eselon IV / Setara	Jumlah SDM
6	Ka Bid Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	IIIa	-
7	Ka. Sub. Bag Keuangan	IV	1
8	Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	IV	1
9	Kepala UPT PPA	IV	1
10	Perencana Ahli Muda	IV	1
11	Penyuluh Sosial Ahli Muda	IV	2
12	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	IV	1
13	Pekerja Sosial Ahli Pertama	-	1
14	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	9
15	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	-	2
17	Penata Laksana Barang Terampil	-	1
18	Penata Layanan Operasional	-	4
19	Penelaah Teknis Kebijakan	-	5
20	Pengadministrasi Perkantoran	-	2
21	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	-	1
22	Perencana Ahli Pertama	-	1
	Grand Total		37

Terdapat 2 (dua) jabatan struktural yang belum memiliki pejabat definitif, yaitu Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Selain pegawai yang berstatus ASN diatas, terdapat juga 30 (tiga puluh) orang pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas (Non Aparatur Sipil Negara), yang bertugas di 18 Balai Penyuluh serta di Dinas KBPPPA sebagai tenaga pembantu administrasi.dan pendamping kasus pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki:

1. Gedung Bangunan Utama Kantor Dinas KBPPPA sejumlah 1 (satu) gedung, dengan kondisi cukup baik, dengan kebutuhan perbaikan sebagai berikut:
 - a) Atap Gedung Utama kondisi: bocor karena kerusakan saluran alir / talang;
 - b) Atap Gudang bocor parah;
 - c) Plafond ruang pertemuan rusak / jebol dan berlubang;
 - d) Wallpaper ruang pertemuan rusak;
 - e) Kamar mandi tidak memenuhi syarat aksesibilitas utk orang dengan disabilitas;

- f) Pojok Laktasi belum memiliki ruangan khusus yang memadai (tertutup, ventilasi memadai dan AC);
2. Gedung Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sejumlah 1 (satu) gedung dalam kondisi cukup baik, dengan kebutuhan perbaikan sebagai berikut:
- a) Atap gedung terbuat dari asbes dan sudah termakan usia hingga butuh diganti. Selain itu penggunaan asbes untuk atap bangunan meningkatkan resiko gangguan paru-paru dan tidak dianjurkan dalam kesehatan;
- b) Gedung dan Kamar mandi tidak memenuhi syarat aksesibilitas;
3. Gedung Rumah Aman (Shelter) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus sejumlah 1 (satu) gedung, dengan kebutuhan perbaikan sebagai berikut:
- a) kebocoran parah yang diperkirakan karena ada kesalahan struktur sistem drainase atap;
- b) Terdapat ruangan yang tidak efektif, sementara kapasitas ruang tidur terbatas;
- c) Tidak ada dapur.
4. Gedung Balai Penyuluh sejumlah 18 Bangunan di 18 Kecamatan, dengan kondisi sebagai berikut:

Lokasi	Ringkasan Kondisi	Kategori Kerusakan
Balopanggang	Plafon jebol, cat tembok mengelupas, plafon bocor, ventilasi kamar mandi	Ringan
Benjeng	Plafon jebol, cat tembok mengelupas	Ringan
Kedamean	Plafon bocor dekat aliran listrik	Sedang
Dukun	Atap bocor, plafon rusak, keramik retak, pintu rusak	Sedang
Wringinanom	Atap banyak bocor, dinding retak, pompa sumur	Sedang
Manyar	Talang bocor, asbes hampir jatuh	Sedang
Cerme	Keramik pecah, instalasi listrik & PDAM rusak	Sedang
Panceng	Pintu rusak, plafon rusak, keramik pecah, atap bocor	Sedang
Tambak	Atap bocor, dinding merembes, kaca pecah, perlu pengecatan	Sedang
Sangkapura	Kamar mandi bocor	Ringan
Duduk Sampeyan	Tembok pembatas ambruk (struktur rusak)	Berat
Gresik	Plafon bocor, jendela pecah, wastafel rusak	Sedang
Ujung Pangkah	Plafon rusak, gagang pintu rusak, lantai pecah	Sedang
Kebomas	Banyak kerusakan minor (atap bocor, tembok retak, pintu rusak, cat)	Sedang
Menganti	Atap bocor, plafon rusak, lampu mati, pintu susah menutup	Sedang
Sidayu	Pintu rusak, engsel rusak, plafon retak, air	Sedang

Lokasi	Ringkasan Kondisi	Kategori Kerusakan
	bocor	
Bungah	Pintu ruangan & kamar mandi rusak	Ringan-Sedang
Driyorejo	Bocor, pintu depan susah buka/tutup	Sedang

2.1.2.2.1 Sarana Prasarana

Jenis Barang Yang dibeli	Baik	Kuran g Baik	Rusak Berat	Tidak Ada Info	Grand Total
A.C. SPLIT	11			13	24
AC				2	2
AC SPLIT	25				25
AC UNIT				3	3
ALAT PEMADAM / PORTABLE	2				2
ALAT PENGHANCUR KERTAS	1				1
ALAT PERAGA / PRAKTIK SEKOLAH (GENRE KIT)				5	5
ALAT PERAGA EDUKATIF				9	9
ALMARI ARSIP				3	3
ALMARI KAYU				5	5
BACKDROP TV KAYU	1				1
BKB KIT	36				36
BRANKAS				1	1
CAMERA DIGITAL				1	1
CAMERA FILM	1				1
CCTV	1				1
CPU	4			1	5
CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	18				18
DISPENSER	1			2	3
EXHAUSE FAN	21				21
EXHAUST FAN				35	35
FILLING BESI/METAL				4	4
GORDYN				1	1
HOME THEATER	1				1
HYGROMETER				1	1
IMPLANT KIT				40	40
IMPLANT REMOVAL KIT				1	1
IMPLANTKIT				40	40
IUD KIT				18	18
IUD KIT (UTILITY TRAY COVER)				77	77
KARPET	1				1
KIPAS ANGIN	8				8
KIPAS ANGIN BERDIRI				10	10
KIPAS ANGIN DINDING				5	5
KOMPOR GAS				1	1
KURSI KERJA				3	3
KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	205				205
KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	2				2

Jenis Barang Yang dibeli	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ada Info	Grand Total
KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	1				1
KURSI LIPAT				22	22
KURSI PUTAR				5	5
KURSI RAPAT				30	30
KURSI SOFA TAMU BENTUK L				1	1
KURSI TAMU				2	2
LAMPU (NEON BOX)	12				12
LAP TOP				1	1
LAPTOP	36				36
LCD PROYEKTOR	10			6	16
LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAS	13				13
LEMARI BESI/METAL	5			2	7
LEMARI ES	2			1	3
LEMARI KAYU	3			7	10
LOUDSPEAKER				2	2
MAINAN EDUKASI	1				1
MEJA / KURSI KERJA				17	17
MEJA / KURSI RAPAT				6	6
MEJA / KURSI TAMU				2	2
MEJA 1/2 BIRO				10	10
MEJA KERJA				16	16
MEJA KERJA ESELON 3				4	4
MEJA KERJA ESELON 4				9	9
MEJA KERJA KAYU	5				5
MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	13				13
MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1				1
MEJA KERJA PEJABAT ESELON III				3	3
MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV				4	4
MEJA KERJA STAF				10	10
MEJA MAKAN 4 KURSI				1	1
MEJA RAPAT				24	24
MEJA RESEPSIONIS				1	1
MEJA TAMU				1	1
MESIN CUCI	1				1
MESIN FOTOCOPY				1	1
MESIN JAHIT				15	15
MESIN KETIK ELEKTRONIK				3	3
MESIN KETIK LISTRIK PORTABLE				1	1
MESIN PENGHISAP DEBU	1				1
MICRO BUS (PENUMPANG 10 S/D 30 ORANG)	1				1
MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH)	1				1

Jenis Barang Yang dibeli	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ada Info	Grand Total
MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)		1			1
MODEM				1	1
MONITOR				1	1
MUPEN (MOBIL UNIT PENERANGAN)		1			1
NEEDLE DESTROYER				40	40
NOTE BOOK				61	61
NOTE BOOK (LAPTOP)	1				1
OBGYN BED				22	22
OVERHEAD PROJECTOR				5	5
P.C ALL IN ONE	2				2
P.C. ALL IN ONE	1				1
P.C.ALL IN ONE	2				2
P.C.UNIT	43				43
PALET	6				6
PAPAN NAMA INSTANSI				10	10
PAPAN STRUKTUR ORGANISASI				1	1
PAPAN TULIS				3	3
PC. + MONITOR 19"				1	1
PC.UNIT				58	58
PENGADAAN ALAT ALAT KEDOKTERAN				1	1
PICK UP	1				1
PIRING/GELAS/MANGKUK /CANGKIR/SENDOK/GARPU/PISAU				2	2
POMPA KEBAKARAN/PORTABLE				1	1
PRINTER	35			52	87
PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	18				18
PROYEKTOR	25				25
PROYEKTOR + ATTACHMENT	15			5	20
RAK ARSIP				3	3
RAK BESI	5				5
RAK BESI / METAL	38				38
RAK BESI/METAL				10	10
RAK KAYU				10	10
RAK OBAT	4				4
RAK TV	1			2	3
SCANNER	3				3
SCREEN TRIPOD	25				25
SEPEDA MOTOR	41	108	35	25	209
SMART TV	1				1
SMARTPHONE				60	60
SOFA	1				1
SPRENG BED				5	5
STABILISATOR				1	1
STATION WAGON	2	2			4

Jenis Barang Yang dibeli	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ada Info	Grand Total
STERILISATOR UAP 125				52	52
TABLET	2				2
TABUNG PEMADAM API				1	1
TANGGA ALUMUNIUM	1				1
TELEPHONE (PABX)				1	1
TELEVISI	1			2	3
TELEVISI LED				1	1
TEMPAT TIDUR BESI/METAL (LENGKAP)				2	2
TIANG BENDERA				1	1
TONG / KERANJANG SAMPAH				35	35
TONG / TEMPAT SAMPAH				12	12
TRIPOD SCREEN PROJECTOR	10				10
WALL EXHAUST FAN				20	20
WHITE BOARD				6	6
WHITEBOARD / PAPAN TULIS				5	5
WIRELESS (PUBLIK ADRESS)				13	13
WIRELESS AMPLIFIER				20	20
WIRELESS SPEAKER AKTIF				1	1
(blank)					
Grand Total	729	112	35	1040	1916

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menyelenggarakan pelayanan publik pada dua urusan pemerintahan, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Kedua urusan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dirancang untuk menjawab isu strategis pembangunan daerah, dengan sasaran utama peningkatan kualitas hidup keluarga, perempuan, dan anak.

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ruang lingkup pelayanan meliputi: (1) peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar yang berkeadilan gender, (2) penguatan peran keluarga dan internalisasi nilai-nilai sosial budaya dalam pembangunan daerah, serta (3) penyediaan layanan komprehensif bagi kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Indikator kinerja yang digunakan antara lain persentase desa yang mengakomodasi usulan perempuan, persentase perangkat daerah yang melaksanakan Analisis Responsif Gender (ARG), serta persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif.

Sementara itu, Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk difokuskan pada pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga. Beberapa indikator yang digunakan mencakup Total Fertility Rate (TFR), Contraceptive Prevalence Rate (CPR), serta persentase usia kawin pertama di bawah 20 tahun. Program pada urusan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi penganggaran, kedua urusan memperoleh alokasi yang relatif fluktuatif antar tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas fiskal. Realisasi anggaran menunjukkan capaian yang bervariasi pada masing-masing program. Perbedaan tersebut menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pada periode perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, rasio realisasi anggaran terhadap rencana menunjukkan tingkat pencapaian yang baik pada sebagian besar program, meskipun terdapat variasi antar program yang

mencerminkan tantangan dalam implementasi di lapangan. Dengan penguatan indikator kinerja dan pemanfaatan anggaran yang optimal, Dinas terus berupaya meningkatkan pelayanan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan gender, sekaligus memperkuat perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan di wilayah Gresik.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana pada Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2021 s.d. 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Th. 2021 s.d. 2024

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
1	Indeks Pembangunan Gender	v		v				90.96	91.12	91.86	92.42		90.2	90.78	91.39	91.39	99.80	100.30	99.49	107.99
2	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan		v					2%	4%	6%	8%		4.21%	2.25%	6.74%	9.55%	210.50	56.25	112.33	119.38
3	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)		v					10%	15%	20%	25%		10.42%	12.73%	19.64%	21.28	104.20	84.87	98.20	8,512.00
4	Total Fertility Rate (TFR)		v					1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2		1.89	1,89 (Th. 2021)	1,89 (Th. 2021)	1,94 Kelahiran (Th. 2023)	100.53	100.53	100.53	100.00
5	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)		v					70-76	70-76	70-76	70-76		78.42	78,42 (Th. 2021)	78,42 (Th. 2021)	67.78%	112.03	112,03	112,03	96.83

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
6	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun		v					12.15%	12.15%	12.15%	12.15%		13.65%	13,65% (Th. 2021)	13,65% (Th. 2021)	11,48% (Th. 2023)	89.01	89.01	89.01	89.01
7	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif		v					70%	80%	90%	100%		100%	100%	100%	100%	142.86	125.00	111.11	100.00
8	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif		v					70%	80%	90%	100%		100%	100%	100%	100%	142.86	125.00	111.11	100.00
9	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE		v					Level 1	Level 1	Level 2	Level 2		Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Persentase Usulan Perempuan			v				N/A	15	20	25		N/A	43.28	23.91	40	N/A	288.53	119.55	160.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD																			
11	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya							5	10	20	30		5	6	19	30	100.00	60.00	95.00	100.00
12	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif							N/A	N/A	55	55		N/A	N/A	55	47	100	60	95	100

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota																			
13	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes							N/A	17	30	45		N/A	15	30	34	N/A	88.24	100.00	75.56
14	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							N/A	N/A	17	17		N/A	N/A	17	17	100	100	100	100
15	Jumlah Lembaga							10	10	10	10		10	10	10	3	100.0	100.	100.	30.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	/ kelompok masyarakat yang difasilitasi																0	00	00	
16	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							N/A	N/A	#N/A	675		N/A	N/A	#N/A	675	N/A	N/A	N/A	100.00
17	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan			v				96	96	96	96		63	87.5	88.8	89.94	65.63	91.15	92.50	93.69
18	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi							30	30	30	30		30	30	10	30	100.00	100.00	33.33	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	dalam melakukan pencegahan kekerasan																			
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							N/A	N/A	#N/A	1		N/A	N/A	#N/A	1	N/A	N/A	N/A	100.00
20	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil diselesaikan							115	115	115	115		24	70	87	152	20.87	60.87	75.65	132.17
21	Jumlah Perempuan							N/A	N/A	100	100		N/A	N/A	98	100	N/A	N/A	98.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan																			
22	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							N/A	N/A	#N/A	100		N/A	#N/A	#N/A	68	N/A	#N/A	N/A	68.00
23	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi							10	10	10	10		10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga							10	10	10	10		10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas																			
25	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik							N/A	N/A	100	100		N/A	N/A	98	66	N/A	N/A	98.00	66.00
26	Persentase sasaran yang pendapatannya			v				N/A	10%	10	10%		N/A	12.5	28	9.58 %	N/A	12,500.00	280.00	95.80

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	meningkat dari tahun sebelumnya																			
27	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan							N/A	10	16	16		N/A	20	16	23	N/A	200.00	100.00	143.75
28	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							N/A	N/A	#N/A	16		N/A	N/A	#N/A	8	N/A	N/A	N/A	50.00
29	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak			v				114	120	130	140		111.5	111.5	125.5	152.65	97.81	92.92	96.54	109.04
30	Jumlah Indikator							N/A	5	7	8		N/A	5	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat								indikator	Indikator	Indikator			indikator	Indikator	Indikator				
31	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha							N/A	N/A	82	82		N/A	N/A	82	82	N/A	N/A	100.00	100.00
32	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah							7	10	7	7		7	10	7	7	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Diselenggarakan																			
33	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							N/A	N/A	7	7		N/A	N/A	7	7	N/A	N/A	100.00	100.00
34	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Berhasil Diselesaikan			v				50%	100%	100%	100%		82	83.42	73.9	83.7	16,400	8,342	7,390	8,370.00
35	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan							30	30	30	30		30	30	30	30	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan																			
36	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA							N/A	N/A	#N/A	17		N/A	N/A	#N/A	17	N/A	N/A	#N/A	100.00
37	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan							50	60	70	80		108	161	184	191	216.00	268.33	262.86	238.75
38	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan							N/A	N/A	#N/A	100		N/A	N/A	#N/A	128	N/A	N/A	#N/A	128.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
39	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan							N/A	N/A	#N/A	100		N/A	N/A	#N/A	100	N/A	N/A	#N/A	100.00
40	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas							1	1	1	1		1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
41	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK							N/A	N/A	#N/A	5		N/A	N/A	#N/A	40	N/A	N/A	#N/A	800.00
42	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	89%	100.00	100.00	100.00	89.00
43	Jumlah Dokumen							5	N/A	N/A	1		5	N/A	5	89%	100.00	N/A	N/A	89.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja																			
44	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							N/A	1	1	1		N/A	1	1	1	N/A	100.00	100.00	100.00
45	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							N/A	5	12	12		N/A	5	12	1	N/A	100.00	100.00	N/A
46	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar							12	12	12	12		12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
47	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							26	26	26	26		26	26	27	12	100.00	100.00	103.85	46.15
48	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan							11	30	30	30		11	30	#N/A	23	100.00	100.00	#N/A	76.67

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi																			
49	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							N/A	11	15	15		N/A	15	15	30	N/A	136.36	100.00	200.00
50	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							5	41	10	10		41		200.00	100.00	100.00	150.00	200.00	100.00
51	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							6	8	8	8		6	8	8 paket	10 Paket	100.00	100.00	100.00	125.00
52	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							N/A	407	600	600		N/A	407	600 laporan	8 Paket	N/A	100.00	100.00	1.33

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
53	Jumlah Jasa Operasional yang tersedia							46	46	46	46		46	46	46 orang	600 Laporan	100.00	100.00	100.00	1,304.35
54	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							N/A	NA	3	3		N/A	NA	3 laporan	46 Oran g	N/A	N/A	100.00	100.00
55	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							43	46	43	43		43	46	43	43	100.00	100.00	100.00	100.00
56	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia							4	4	4	4		4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00
57	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							1	1	1	1		1	1	1	1	100	100.00	100.00	100

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
58	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							8	9	9	30		9	9	9	1	112.50	100.00	100.00	3.33
59	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2	2	3	1		2	2	3	30	100.00	100.00	100.00	3,000.00
60	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							5	5	#N/A	5		5	5	#N/A	5	100.00	100.00	N/A	100.00
61	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK			v				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100.00	10,000.00	100.00	100.00
62	Jumlah Unit							153	153	153	153		153	153	153	504	100	100	100	329,41

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK																			
63	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota							N/A	N/A	1	1		N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100.00	100.00
64	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							N/A	N/A	#N/A	4		N/A	N/A	#N/A	4	N/A	N/A	#N/A	100,00
65	Jumlah							2	1	1	1		2	1	1	1	100.0	100.	100.	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Dokumen Data																0	00	00	
66	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							N/A	N/A	18	18		N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	100.00	100.00
67	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							N/A	N/A	18	18		N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	100.00	100.00
68	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							N/A	N/A	12	12		N/A	N/A	18	12	N/A	N/A	150.00	100.00
69	Unmet Need ber-KB			v				11%	10.50%	10%	9.60%		13.88	10.08	9.55	9.18%	12,61	9,6	9,55	95.63
70	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi							18	18	18	18		18	18	18	18	100.00	100.00	100.00	100.00
71	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan							N/A	N/A	18	18		N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	100.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																			
72	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini							N/A	N/A	18	18		N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	100.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Lokakarya (Minilok)																			
73	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							N/A	N/A	18	18		N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	100.00	100.00
74	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,							N/A	N/A	N/A	32		N/A	N/A	#N/A	32	N/A	N/A	N/A	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			
75	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi							18	18	18	18		18	18	18	18	100.00	100.00	100.00	100.00
76	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							N/A	N/A	356	356		N/A	N/A	356	712	N/A	N/A	100.00	200.00
77	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,							18	18	18	18		18	18	18	18	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																			
78	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani							2500	2600	2600	2700		2304	2600	4829	5019	92.16	100.00	185.73	185.89
79	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							N/A	N/A	2500	2500		N/A	N/A	4829	5019	N/A	N/A	193.16	200.76
80	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB							N/A	18	18	18		N/A	18	5	18	N/A	100.00	27.78	100.00
81	Jumlah Kampung KB yg							53	53	N/A	53		53	53	#N/A	356	100.00	100.00	#N/A	671.70

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya																			
82	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							N/A	N/A	166	166		N/A	N/A	166	356	N/A	N/A	100.00	214.46
83	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB							N/A	N/A	53	117		N/A	N/A	166	120	N/A	N/A	313.21	102.56
84	Persentase Pembina Keluarga			v				6.16 %	7%	8%	9%			27%	37.08	10.11	0.00	385.71	46,350.00	11,233.33

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Berencana Desa yang berstatus mandiri																			
85	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis							7	7	7	7		7	7	7	7	100.00	100.00	100.00	100.00
86	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan							N/A	N/A	1	5		N/A	N/A	1	5	N/A	N/A	100.00	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																			
87	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							N/A	N/A	#N/A	5		N/A	N/A	#N/A	5 Laporan	N/A	N/A	#N/A	100.00
88	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,							N/A	N/A	#N/A	18		N/A	N/A	#N/A	18 Unit	N/A	N/A	#N/A	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia																			
89	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan							N/A	N/A	#N/A	2920		N/A	N/A	#N/A	2920 Oran g	N/A	N/A	#N/A	100.00
90	Jumlah Kelompok							N/A	N/A	#N/A	715		N/A	N/A	#N/A	715 Kelo	N/A	N/A	#N/A	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan															mpok				
91	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile							N/A	N/A	#N/A	356		N/A	N/A	#N/A	356	N/A	N/A	#N/A	100.00
92	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk							N/A	N/A	#N/A	18		N/A	N/A	#N/A	18	N/A	N/A	#N/A	100.00

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
93	Jumlah Dokumen Ketahanan Keluarga Hasil Melalui Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							N/A	N/A	#N/A	18		N/A	N/A	#N/A	18	N/A	N/A	#N/A	100.00

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ditentukan berdasarkan dua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

Pada **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, kelompok sasaran mencakup:

1. **Perempuan**, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas, akses terhadap pelayanan dasar, serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.
2. **Anak**, termasuk anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, maupun anak dari keluarga rentan.
3. **Keluarga**, sebagai unit sosial terkecil yang memiliki fungsi strategis dalam pembinaan karakter, pengasuhan, dan perlindungan anak.
4. **Masyarakat umum**, dalam konteks internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dan pembangunan yang ramah anak.

Sedangkan pada **Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk**, kelompok sasaran meliputi:

1. **Pasangan Usia Subur (PUS)**, melalui layanan keluarga berencana dan pengaturan kelahiran.
2. **Remaja**, terkait dengan program pendewasaan usia perkawinan, pencegahan pernikahan dini, serta edukasi kesehatan reproduksi.
3. **Keluarga**, dalam rangka peningkatan ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas pengasuhan.
4. **Masyarakat umum**, terutama dalam kaitannya dengan pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan dinas ini tidak hanya terbatas pada individu tertentu, melainkan juga mencakup keluarga sebagai satuan sosial serta masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan memiliki dimensi lintas kelompok umur, gender, dan kondisi sosial, sesuai dengan mandat urusan pemerintahan yang diemban.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa dukungan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik bermitra dengan sejumlah lembaga yang memiliki fungsi dan peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pelayanan.

Pada aspek pelayanan kesehatan, kemitraan dilakukan dengan fasilitas kesehatan, baik puskesmas, bidan, maupun rumah sakit. Kerja sama ini terutama terkait dengan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta penanganan medis bagi korban kekerasan.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemitraan dijalin dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk mendukung proses hukum, serta dengan lembaga pelayanan psikologi dan lembaga bantuan hukum dalam rangka penyediaan layanan psikososial dan pendampingan hukum bagi korban. Selain itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Pondok Pesantren juga menjadi mitra penting dalam upaya rehabilitasi sosial, pengasuhan alternatif, dan pembinaan karakter anak.

Kemitraan juga melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO), antara lain Pattiro dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan

(KPS2K), yang berperan dalam advokasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, Dinas bermitra dengan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB) serta komunitas Insan Generasi Berencana (Genre). Kedua mitra ini berperan dalam edukasi, promosi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan pasangan usia subur, terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta ketahanan keluarga.

Melalui kemitraan tersebut, pelayanan yang diselenggarakan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan mandat urusan pemerintahan yang diemban.

2.1.6. Dukungan BUMD

Tidak terdapat dukungan BUMD pada kegiatan Dinas KBPPPA

2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Tidak terdapat kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

a. Permasalahan terkait kepegawaian:

- 1) Belum ada mekanisme rekrutmen serta manajemen kepegawaian untuk tenaga non pns pendamping kasus untuk menjalankan tugas dan fungsi perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan. Layanan ini membutuhkan SDM dengan kualifikasi dan pembiayaan

yang khusus;

- 2) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik memiliki kader di setiap RW, namun belum memiliki mekanisme yang efektif untuk transfer informasi dan peningkatan kapasitas;

b. Permasalahan terkait Keluarga Berencana:

- 1) Mobil Unit Pelayanan KB yang merupakan sarana untuk melaksanakan layanan *mobile* Metode Operasi Pria sudah rusak dan tidak bisa digunakan;
- 2) Balai Penyuluh
 - a) Sebagian besar (75%) Balai Penyuluh KB mengalami kerusakan sedang, terutama pada atap, plafon, dan dinding.
 - b) Kerusakan ringan hanya muncul pada 3 balai (Benjeng, Sangkapura, Balopanggang kedua).
 - c) Satu balai (Duduk Sampeyan) termasuk berat karena dinding pembatas roboh.

c. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk:

Indikator *Total Fertility Rate (TFR)* menunjukkan tren sedikit meningkat dari 1,89 pada tahun 2021 menjadi 1,94 pada tahun 2023, dengan capaian 98% dari target (1,9–2,0).

Kenaikan ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian kelahiran belum optimal. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi antara lain:

- 1) Menurunnya partisipasi aktif masyarakat dalam program keluarga berencana.
- 2) Terbatasnya intensitas pendampingan dan pemantauan peserta KB pasca-pandemi.
- 3) Masih adanya kesenjangan antarwilayah dalam capaian TFR, di mana sebagian wilayah pedesaan cenderung memiliki angka kelahiran lebih tinggi.

Meningkatnya kembali preferensi terhadap metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan metode jangka panjang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan penduduk apabila tidak diimbangi dengan penguatan program pengendalian kelahiran dan peningkatan kesadaran reproduksi sehat.

Indikator *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 78,42% pada tahun 2021 menjadi 67,78% pada tahun 2024, dengan capaian 97% terhadap target (70–76%). Penurunan ini menunjukkan bahwa cakupan peserta aktif KB menurun. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain:

- a) Menurunnya retensi peserta KB (drop-out) akibat kurangnya monitoring dan kunjungan lapangan.
- b) Terbatasnya akses terhadap layanan KB, khususnya untuk wilayah terpencil atau dengan jumlah tenaga penyuluh yang terbatas.
- c) Masih adanya kekhawatiran atau persepsi negatif terhadap metode kontrasepsi jangka panjang.
- d) Pergeseran prioritas masyarakat pasca-pandemi yang lebih berfokus pada pemulihan ekonomi keluarga.
- e) Penurunan CPR ini berkorelasi dengan peningkatan TFR, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan peserta aktif KB.

Indikator usia kawin pertama di bawah 20 tahun menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian 9,27% dibandingkan target 12,15% (131% capaian). Hal ini menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda usia perkawinan. Capaian ini juga berdampak positif terhadap pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga. Namun demikian, tetap perlu dilakukan validasi data untuk memastikan seluruh perkawinan usia dini tercatat, mengingat masih terdapat kemungkinan perkawinan tidak tercatat di beberapa wilayah. Secara umum, capaian indikator bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan tren positif dalam aspek usia kawin pertama dan pelayanan perlindungan perempuan, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam pengendalian kelahiran dan keberlanjutan peserta KB aktif.

Kondisi ini menandakan perlunya langkah penguatan baik dari sisi program, pendampingan, maupun sosialisasi.

Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Desa Indikator Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) menunjukkan capaian yang cukup baik.

Realisasi tahun 2024 sebesar 9,55% melampaui target 8%, dengan capaian 119%. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelibatan perempuan di tingkat perencanaan pembangunan desa. Desa mulai membuka ruang partisipasi bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan spesifik gender. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain:

- Jumlah desa yang benar-benar menerapkan prinsip gender mainstreaming masih terbatas.
- Kapasitas aparat desa dalam menyusun perencanaan yang responsif gender belum merata.
- Usulan perempuan yang sudah masuk ke Musrenbang belum seluruhnya diakomodasi hingga tahap penganggaran.

● Permasalahan Utama:

Peningkatan partisipasi sudah terlihat, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan dan kapasitas teknis aparat desa dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Permasalahan terkait Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:

- 1) Belum ada SOP Terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 2) Shelter sudah ada, namun dalam kondisi bocor dan belum memiliki fasilitas dasar yang layak sebagai tempat tinggal sementara perempuan dan anak yang menjadi dampingan dinas, antara lain dapur, ruang aktivitas anak dan ruang tidur anak;
- 3) Belum ada mekanisme pembiayaan dan kepegawaian terkait operasional layanan;

- 4) Kabupaten Gresik belum memenuhi indikator yang dibutuhkan untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak;
- 5) Masih terjadi perkawinan anak;

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan faktor-faktor kunci yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Identifikasi isu strategis dilakukan sebagai langkah awal dalam menyusun arah kebijakan dan strategi agar perencanaan yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan demografi yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, isu strategis tidak hanya mencakup persoalan kinerja internal, tetapi juga tantangan eksternal seperti perubahan struktur penduduk, kesenjangan akses layanan, ketimpangan gender, serta peningkatan kompleksitas permasalahan sosial di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, bab ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi perumusan visi, misi, dan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang lebih fokus, adaptif, serta mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Gresik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keberadaan sekolah vokasi, pesantren, dan perguruan tinggi memberi peluang peningkatan kualitas SDM berbasis keterampilan industri dan karakter religius.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan UMKM Peningkatan Layanan Kesehatan	Migrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif Penanggulan	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis GEDSI dan SDG's
Jaringan koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, serta pasar terbuka melalui pelabuhan dapat menjadi motor pengentasan kemiskinan.	Kemiskinan Kronis Perkotaan dan Kemiskinan Multidimensi	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Konflik internasional	Peningkatan Kesempatan Kerja		Penanggulangan Kemiskinan Kronis dan Multidimensi

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

III.1 Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 s.d. 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
- Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Menjamin perlindungan	serta layanan publik yang inklusif.										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi											
			indeks perlindungan anak (Indeks)	71,57	71.62-72	71.67-72.50	71.72-73	71.77-73.50	71.82-74	71.87-74.50	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks (Skala 0-100))	70,13	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50	
			Indeks Ketimpangan	0,407	0,402	0,38	0,369	0,358	0,347	0,336	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			n Gender (IKG) (Indeks)								
			Indeks inklusi (GEDSI) (Indeks)	56,2	60	64	68	72	76	80	
			Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)	48,87	48	46	44	42	40	38	
		Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun (%)	9,27	9,27	9,07	8,87	8,67	8,47	8,27	
			Total Fertility Rate (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	1,92	1.92-2	1.92-2	1.92-2	1.92-2	1.92-2	1.92-2	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin (%)	10	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	
			Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			if (%)								
		Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	65,72	66,72	67,72	68,72	69,72	70,72	71,72	
		Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan (%)	40	30	40	40	40	40	40	
			Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi	30,43	30	40	50	60	80	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			dokumen Analisa Responsif gender (%)								
		Menurunkan Ketimpangan Kesehatan Reproduksi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,18	9,17	9,16	9,15	9,14	9,13	9,12	
		Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin (%)	9	9	9	9	9	8	8	
		Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		dalam Pembangunan dan Keberdayaan Multidimensi	Mendapat Layanan Konprehensif (%)								
		Meningkatkan Akses Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Terhadap Program Pemberdayaan	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan (Rasio)	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra

Tahap 1 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Penguatan Dasar Program	Peningkatan Akses & Kualitas	Pemerataan & Perluasan Jangkauan	Peningkatan Daya Saing & Keberlanjutan	Konsolidasi Menuju Pembangunan Sosial Berkelanjutan
Penguatan kelembagaan PUG, sosialisasi kesetaraan gender, peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi & sosial.	Peningkatan kapasitas perempuan, akses ekonomi produktif, advokasi kebijakan responsif gender.	Pemerataan akses perempuan di bidang pendidikan, usaha mikro, dan kepemimpinan lokal.	Penguatan daya saing perempuan di bidang ekonomi kreatif, politik, dan kepemimpinan publik.	Konsolidasi capaian pemberdayaan perempuan menuju keberlanjutan pembangunan responsif gender.
Penguatan forum anak, pencegahan kekerasan, pelayanan dasar perlindungan anak.	Perluasan layanan ramah anak, peningkatan kualitas pengasuhan, penguatan lembaga perlindungan anak.	Pemerataan akses layanan kesehatan & pendidikan anak, perlindungan anak berkebutuhan khusus.	Peningkatan kualitas SDM anak untuk daya saing, keberlanjutan Kota/Kabupaten Layak Anak.	Konsolidasi perlindungan anak terpadu, penguatan ekosistem ramah anak yang berkelanjutan.
Penguatan layanan KB, peningkatan pengetahuan keluarga tentang kesehatan reproduksi.	Perluasan cakupan peserta KB, peningkatan kualitas konseling keluarga, penguatan BKB (Bina Keluarga Balita).	Pemerataan layanan KB di wilayah pinggiran, peningkatan kualitas hidup keluarga melalui program ketahanan keluarga.	Penguatan peran keluarga sebagai unit ketahanan sosial, inovasi program KB berbasis teknologi & data.	Konsolidasi program KB, keluarga sejahtera, dan ketahanan keluarga menuju pembangunan sosial berkelanjutan.

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk memastikan tercapainya tujuan utama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, strategi pembangunan lima tahun ke depan difokuskan pada penguatan ekosistem pembangunan manusia yang setara, sehat, dan berdaya. Strategi ini menekankan sinergi antara kebijakan, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan yang diambil bersifat integratif dan berbasis data, agar setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga. Secara garis besar, strategi utama yang akan ditempuh meliputi:

- 1) Membangun sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang berbasis gender dan inklusi sosial; memperkuat peran gugus tugas PUG dan forum anak di seluruh tingkat pemerintahan; serta memastikan seluruh kebijakan daerah mengintegrasikan perspektif gender, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga.
- 2) Memperluas jangkauan dan mutu layanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, konseling keluarga, serta layanan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat dan digital. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaksana, ketersediaan fasilitas ramah perempuan dan anak, serta kemudahan akses bagi kelompok rentan dan wilayah terpencil.
- 3) Mengintegrasikan intervensi sensitif stunting melalui kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial, dan pangan). Strateginya meliputi peningkatan pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi remaja, pemantauan tumbuh kembang balita, serta peningkatan literasi keluarga tentang pangan bergizi seimbang. Dinas juga memastikan partisipasi aktif perempuan dan kader KB dalam program percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
- 4) Melaksanakan program keluarga berencana yang adaptif dan inklusif dengan memperluas akses terhadap alat kontrasepsi modern, peningkatan kualitas layanan KB pasca-persalinan, serta edukasi reproduksi sehat bagi remaja dan pasangan usia subur. Strategi ini juga mencakup penguatan peran penyuluh KB,

kampanye nasional, serta integrasi data peserta KB aktif untuk mendukung pengendalian TFR secara terukur.

- 5) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi produktif melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi kewirausahaan, akses permodalan, dan kemitraan dengan dunia usaha. Langkah ini bertujuan memperkecil kesenjangan gender, memperkuat posisi tawar perempuan dalam keluarga, dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.
- 6) Menumbuhkan ketahanan sosial keluarga melalui pendidikan parenting, komunikasi keluarga, dan kampanye pencegahan kekerasan serta perkawinan anak. Program diarahkan agar keluarga menjadi lingkungan pertama yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal
- 7) Membangun sistem data terpadu berbasis gender, anak, dan keluarga untuk mendukung perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Data terintegrasi digunakan untuk pemantauan capaian indikator strategis seperti IDG, IKG, GEDSI, stunting, dan TFR secara real time.
- 8) Mengoptimalkan kerja sama lintas sektor dengan OPD, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan media. Kolaborasi ini memperluas jangkauan advokasi, sumber daya, serta inovasi program agar hasil pembangunan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.3 Arah dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 s.d. 2029

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan Berdasarkan Kerangka Transformasi	
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Transformasi layanan kesehatan primer yang holistik dan berkelanjutan melalui penguatan sistem layanan berbasis keluarga dan komunitas, pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil, digitalisasi layanan dan integrasi data kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang profesional dan humanis, serta sinergi lintas sektor dalam mendorong perilaku hidup sehat dan ketahanan kesehatan masyarakat menuju Gresik yang sehat, tangguh, dan inklusif.	Transformasi Sosial	Membangun sistem layanan kesehatan primer berbasis keluarga dan komunitas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat promosi dan edukasi perilaku hidup sehat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga derajat kesehatan secara kolektif dan berkelanjutan.
	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh siklus pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan kapasitas kelompok rentan, pemenuhan hak hak dasar serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik, serta kolaborasi multipihak yang menjamin ruang partisipatif, nondiskriminatif, dan berkeadilan sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan menuju	Transformasi Sosial	Mengarusutamakan perspektif gender dan inklusi sosial dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan interseksionalitas dan berorientasi pada hak asasi manusia.
			Transformasi Tata Kelola	Membangun sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan Berdasarkan Kerangka Transformasi	
		Gresik yang setara, inklusif, dan berdaya.		responsif gender dan inklusif melalui kelembagaan yang kuat, regulasi pendukung, serta kapasitas aparatur yang sensitif terhadap isu ketimpangan dan diskriminasi.
	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor dan multipihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif guna memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, serta berdaya sebagai subjek pembangunan masa depan.	Transformasi Sosial	Memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif melalui pendekatan berbasis hak anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; serta menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang ramah anak dan bebas kekerasan.
			Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tata kelola perlindungan anak yang akuntabel melalui kebijakan berbasis data terintegrasi, penguatan regulasi perlindungan anak, serta sistem koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang responsif terhadap isu-isu kerentanan anak.
			Kerangka Implementasi Transformasi Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Kerangka Implementasi Transformasi Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
			Kerangka Implementasi Transformasi Kesenambungan Pembangunan	Mengarusutamakan kebijakan perlindungan dan partisipasi anak dalam seluruh siklus pembangunan daerah lintas periode, serta memperkuat investasi sosial untuk pembangunan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas KBPPPA

Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang menandai berakhirnya periode kepemimpinan kepala daerah sekaligus menjadi awal tanggung jawab kepala daerah berikutnya. Dalam perencanaan pembangunan daerah, tahun 2030 memiliki posisi strategis sebagai jembatan kesinambungan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar tidak terjadi kekosongan perencanaan akibat pergantian kepemimpinan. Program dan target kinerja tahun 2030 dirumuskan secara sistematis dengan memperhatikan konsistensi terhadap visi, misi, serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sekaligus untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah jangka panjang menengah berikutnya. Dengan demikian program tahun 2030 tidak hanya sebagai penutup rencana strategis periode berjalan, tetapi juga sebagai pedoman transisi menuju Renstra PD tahun 2030-2034.

Tabel 4.1 Rumusan Program Renstra Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 s.d. 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta layanan publik yang inklusif.				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
rentan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan							
					indeks perlindungan anak (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks (Skala 0-100))		
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
					Indeks inklusi (GEDSI) (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak			Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun (%)		
					Total Fertility Rate (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)		
					Persentase Nilai Klaster	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			semua anak secara komprehensif		Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (%)	ANAK (PHA)	
				Tercapainya Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas Ramah Anak	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana [KB]		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terfasilitasinya Balai Penyuluh	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Mitra Kerja (Organisasi)		
				Terfasilitasinya Balai Penyuluh	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Meningkatnya akseptor MKJP yang dilayani	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jejaringsnya (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		
				Meningkatnya Kampung KB yg berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS)		Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terfasilitasinya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan sarana,	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pelatihan dan orientasi teknis.	Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)		
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)		
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		
				Terfasilitasinya desa dan kelurahan dengan TPK dan akses internet mobile	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)		
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Anak			Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan (%)		
					Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)		
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			terhadap anak				
					Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Persentase Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang sudah mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				kapasitas	penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Dokumen)		
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS)		Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					perlindungan anak (%)		
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Terfasilitasinya desa dan kelurahan dengan TPK dan akses internet mobile	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		Mewujudkan Lingkungan			Indeks Pembangunan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			Keluarga (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Cakupan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS)		Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak (%)		
				Terfasilitasinya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Orang)		
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)		
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		
				Terfasilitasinya desa dan kelurahan dengan TPK dan akses internet mobile	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)		
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan			Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		n			(%)		
					Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender (%)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBD Desa	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan	2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					advokasi (Lembaga)	Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)		
				Terfasilitasinya Lembaga/Kelompok masyarakat	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
		Menurunkan Ketimpangan Kesehatan			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Reproduksi			terpenuhi (unmet need) (%)		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Persentase Unit Pemberi Layanan yang telah Tersosialisasi Program Bangga Kencana (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Tersosialisasinya Unit Pemberi Layanan dengan Program KKBK	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah dokumen data	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					n Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga	2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana [KB]		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terfasilitasinya Balai Penyuluh	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Mitra Kerja (Organisasi)		
				Terfasilitasinya Balai Penyuluh	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Meningkatnya akseptor MKJP yang dilayani	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Laporan)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		
				Meningkatnya Kampung KB yg berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)		
		Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Bagi Kelompok Rentan			Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS)		Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Terfasilitasinya desa dan kelurahan dengan TPK dan akses internet mobile	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan dan Keberdayaan Multidimensi			Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif (%)		
			Meningkatnya perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terwujudnya OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pencegahan kekerasan	Provinsi (Kebijakan)		
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselesainya kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Korban Kekerasan Tingkataten/Kot a (Orang)	Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan	2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya lembaga/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang	2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan Akses Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Terhadap Program Pemberdayaa			Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan (Rasio)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		n					
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)		
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBD Desa	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Lembaga/Kelompok masyarakat	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					mendapatkan pendampingan (Lembaga)	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	

4.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 4.1 Rumusan Program Renstra Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 s.d. 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.381.979.000,00		1.422.965.000,00		1.475.218.000,00		1.549.122.000,00		1.596.415.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					253.591.000,00		261.112.000,00		270.700.000,00		284.262.000,00		292.940.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembanguna n yang Responsif Gender (%)	30	30	35	253.591.000,00	40	261.112.000,00	45	270.700.000,00	50	284.262.000,00	55	292.940.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					438.850.000,00		451.865.000,00		468.458.000,00		491.926.000,00		506.944.000,00	
Meningkatnya perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan (%)	89,94	96	95	438.850.000,00	95	451.865.000,00	95	468.458.000,00	95	491.926.000,00	95	506.944.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					196.321.000,00		202.143.000,00		209.566.000,00		220.065.000,00		226.783.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung	Cakupan Pembelajaran Keluarga	100	100	100	196.321.000,00	100	202.143.000,00	100	209.566.000,00	100	220.065.000,00	100	226.783.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	(PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)													Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					36.819.000,00		37.911.000,00		39.303.000,00		41.272.000,00		42.532.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (%)	60	60	70	36.819.000,00	80	37.911.000,00	80	39.303.000,00	90	41.272.000,00	90	42.532.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					456.398.000,00		469.934.000,00		487.191.000,00		511.597.000,00		527.216.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan (%)	83,77	85	85	456.398.000,00	85	469.934.000,00	85	487.191.000,00	85	511.597.000,00	85	527.216.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					21.383.641.000,0 0		22.017.830.000,0 0		22.826.354.000,0 0		23.969.888.000,0 0		24.701.660.000,0 0	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.328.050.000,00		7.545.383.000,00		7.822.459.000,00		8.214.342.000,00		8.465.116.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100	7.328.050.000,00	100	7.545.383.000,00	100	7.822.459.000,00	100	8.214.342.000,00	100	8.465.116.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					570.509.000,00		587.429.000,00		609.000.000,00		639.509.000,00		659.033.000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Unit Pemberi Layanan yang telah Tersosialisasi Program Bangga Kencana (%)	100	100	100	570.509.000,00	100	587.429.000,00	100	609.000.000,00	100	639.509.000,00	100	659.033.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.374.236.000,00		4.503.965.000,00		4.669.357.000,00		4.903.278.000,00		5.052.969.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana [KB]	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	67,56	67,56	67,56	4.374.236.000,00	67,56	4.503.965.000,00	67,56	4.669.357.000,00	67,56	4.903.278.000,00	67,56	5.052.969.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI (%)	21	21	21		21		21		21		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN					9.110.846.000,00		9.381.053.000,00		9.725.538.000,00		10.212.759.000,00		10.524.542.000,00	

DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS)	Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak (%)	0,48	-	0,48	9.110.846.000,00	0,48	9.381.053.000,00	0,48	9.725.538.000,00	0,48	10.212.759.000,00	0,48	10.524.542.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	8	7,85	7,70		7,55		7,4		7,2		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak (%)	15	15	15		16		17		18		19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					22765620000.00		23440795000.00		24301572000.00		25519010000.00		26298075000.00	

4.3. Rencana Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tabel 4.3 Rencana Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.381.979.000,00		1.422.965.000,00		1.475.218.000,00		1.549.122.000,00		1.596.415.000,00
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				253.591.000,00		261.112.000,00		270.700.000,00		284.262.000,00		292.940.000,00
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender (%)	30	35	253.591.000,00	40	261.112.000,00	45	270.700.000,00	50	284.262.000,00	55	292.940.000,00
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	30	30	20.345.700,00	30	20949100	30	21718000	30	22806500	30	23502700
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				15.345.700,00		15.949.100,00		16.718.000,00		17.806.500,00		18.502.700,00
Terlaksananya Advokasi	Jumlah pemangku	-	46	15.345.700,00	46	15.949.100,00	46	16.718.000,00	46	17.806.500,00	46	18.502.700,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)											
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terfasilitasinya kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBD Desa	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes	34	45	203.457.200,00	50	209.491.300,00	55	217.184.100,00	60	228.064.500,00	65	235.027.000,00
2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35.605.000,00		36.660.000,00		38.007.000,00		39.911.000,00		41.129.000,00
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	-	17	35.605.000,00	36	36.660.000,00	36	38.007.000,00	36	39.911.000,00	36	41.129.000,00
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				15.260.200,00		15.713.300,00		16.289.100,00		17.105.500,00		17.628.000,00
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	-	510	15.260.200,00	510	15.713.300,00	510	16.289.100,00	510	17.105.500,00	510	17.628.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	(orang)											
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				152.592.000,00		157.118.000,00		162.888.000,00		171.048.000,00		176.270.000,00
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	-	540	152.592.000,00	540	157.118.000,00	540	162.888.000,00	540	171.048.000,00	540	176.270.000,00
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terfasilitasinya Lembaga/Kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	10 Lembaga	3	29.788.100,00		30.671.600,00		31.797.900,00		33.391.000,00		34.410.300,00
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				29.788.100,00		30.671.600,00		31.797.900,00		33.391.000,00		34.410.300,00
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	3	29.788.100,00	21	30.671.600,00	21	31.797.900,00	21	33.391.000,00	21	34.410.300,00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				438.850.000,00		451.865.000,00		468.458.000,00		491.926.000,00		506.944.000,00
Meningkatnya perlindungan terhadap korban kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap	89,94	95	438.850.000,000	95	451.865.000,00	95	468.458.000,00	95	491.926.000,00	95	506.944.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
terhadap perempuan	Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan (%)											
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan											
Terwujudnya OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	30 OPD	36	163.129.000,000	36	167.967.000,000	36	174.134.000,000	36	182.856.000,000	36	188.439.000,000
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				121.001.000,00		124.590.000,00		129.164.000,00		135.633.000,00		139.774.000,00
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	10	121.001.000,00	18	124.590.000,00	18	129.164.000,00	18	135.633.000,00	18	139.774.000,00
2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				42.128.000,00		43.377.000,00		44.970.000,00		47.223.000,00		48.665.000,00
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	-	6	42.128.000,00	3	43.377.000,00	3	44.970.000,00	3	47.223.000,00	3	48.665.000,00
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terselesainya kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan	152 Kasus	115	171.913.000,00	115	177.012.000,00	115	183.513.000,00	115	192.707.000,00	115	198.589.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				125.997.000,00		129.734.000,00		134.498.000,00		141.236.000,00		145.547.000,00
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	100	125.997.000,00	100	129.734.000,00	100	134.498.000,00	100	141.236.000,00	100	145.547.000,00
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				14.042.000,00		14.459.000,00		14.990.000,00		15.741.000,00		16.221.000,00
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	-	24	14.042.000,00	24	14.459.000,00	24	14.990.000,00	24	15.741.000,00	24	16.221.000,00
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.110.000,00		10.410.000,00		10.792.000,00		11.333.000,00		11.679.000,00
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	24	10.110.000,00	24	10.410.000,00	24	10.792.000,00	24	11.333.000,00	24	11.679.000,00
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.617.000,00		5.783.000,00		5.996.000,00		6.296.000,00		6.488.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	12	5.617.000,00	12	5.783.000,00	12	5.996.000,00	12	6.296.000,00	12	6.488.000,00
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				1.404.000,00		1.445.000,00		1.499.000,00		1.574.000,00		1.622.000,00
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	50	1.404.000,00	50	1.445.000,00	50	1.499.000,00	50	1.574.000,00	50	1.622.000,00
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				8.846.000,00		9.109.000,00		9.443.000,00		9.916.000,00		10.219.000,00
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	150	8.846.000,00	150	9.109.000,00	150	9.443.000,00	150	9.916.000,00	150	10.219.000,00
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.897.000,00		6.072.000,00		6.295.000,00		6.611.000,00		6.813.000,00
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	100	5.897.000,00	100	6.072.000,00	100	6.295.000,00	100	6.611.000,00	100	6.813.000,00
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Terfasilitasinya lembaga/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	10 lembaga	3	103.808.000,00	3	106.886.000,00	3	110.811.000,00	3	116.363.000,00	2030	119.916.000,00
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				61.680.000,00		63.509.000,00		65.841.000,00		69.140.000,00		71.251.000,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	95	61.680.000,00	95	63.509.000,00	95	65.841.000,00	95	69.140.000,00	95	71.251.000,00
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				42.128.000,00		43.377.000,00		44.970.000,00		47.223.000,00		48.665.000,00
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	-	100	42.128.000,00	100	43.377.000,00	100	44.970.000,00	100	47.223.000,00	100	48.665.000,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				196.321.000,00		202.143.000,00		209.566.000,00		220.065.000,00		226.783.000,00
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta	Cakupan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	100	100	196.321.000,00	100	202.143.000,00	100	209.566.000,00	100	220.065.000,00	100	226.783.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
perlindungan perempuan dan anak	(%)											
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kecamatan Yang Sudah Memiliki Konsultasi dan Pengaduan keluarga	0	22	196.321.000,00	44	202.143.000,00	66	209.566.000,00	88	220.065.000,00	100	226.783.000,00
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota				92.994.200,00		95.752.000,00		99.225.000,00		104.241.300,00		107.423.500,00
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	-	90	92.994.200,00	90	95.752.000,00	90	99.225.000,00	90	104.241.300,00	90	107.423.500,00
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				103.326.800,00		106.391.000,00		110.341.000,00		115.823.700,00		119.359.500,00
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	-	90	103.326.800,00	90	106.391.000,00	90	110.341.000,00	90	115.823.700,00	90	119.359.500,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				36.819.000,00		37.911.000,00		39.303.000,00		41.272.000,00		42.532.000,00
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (%)	60	70	36.819.000,00	80	37.911.000,00	80	39.303.000,00	90	41.272.000,00	90	42.532.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Tercapainya Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat	Persentase Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat	N/A	12	11.043.000,00	12	11.373.000,00	12	11.790.000,00	12	12.381.000,00	12	12.759.000,00
2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3.681.000,00		3.791.000,00		3.930.000,00		4.127.000,00		4.253.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	110	3.681.000,00	110	3.791.000,00	110	3.930.000,00	110	4.127.000,00	110	4.253.000,00
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3.681.000,00		3.791.000,00		3.930.000,00		4.127.000,00		4.253.000,00
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	-	44	3.681.000,00	44	3.791.000,00	44	3.930.000,00	44	4.127.000,00	44	4.253.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)											
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3.681.000,00		3.791.000,00		3.930.000,00		4.127.000,00		4.253.000,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1	3.681.000,00	1	3.791.000,00	1	3.930.000,00	1	4.127.000,00	1	4.253.000,00
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Tersedianya Fasilitas Ramah Anak	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan	7 JENIS	7	25.776.000,00	36	26.538.000,00	36	27.513.000,00	36	28.891.000,00	36	29.773.000,00
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				25.776.000,00		26.538.000,00		27.513.000,00		28.891.000,00		29.773.000,00
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang	2	10	25.776.000,00	36	26.538.000,00	18	27.513.000,00	18	28.891.000,00	18	29.773.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	mendapatkan pendampingan (Lembaga)											
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				456.398.000,00		469.934.000,00		487.191.000,00		511.597.000,00		527.216.000,00
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan (%)	83,77	85	456.398.000,00	85	469.934.000,00	85	487.191.000,00	85	511.597.000,00	85	527.216.000,00
	Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial (%)	80	80		80		80		80		80	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
Persentase Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang sudah mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	30 OPD	25	65.000.000,00	36	5.000.000,00	36	5.000.000,00	36	5.000.000,00	36	5.000.000,00
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)		36	5.000.000,00	36	5.000.000,00	36	5.000.000,00	36	5.000.000,00	36	5.000.000,00
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan	191 Kasus	100	243.537.000,00	80	250.906.000,00	80	260.304.000,00	80	273.594.000,00	80	282.100.000,00
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				26.639.000,00		27.574.000,00		28.772.000,00		30.461.000,00		31.547.000,00
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	150	26.639.000,00	150	27.574.000,00	150	28.772.000,00	150	30.461.000,00	150	31.547.000,00
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				32.535.000,00		33.500.000,00		34.730.000,00		36.470.000,00		37.583.000,00
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	24	32.535.000,00	24	33.500.000,00	24	34.730.000,00	24	36.470.000,00	24	37.583.000,00
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				4.518.000,00		4.652.000,00		4.823.000,00		5.065.000,00		5.219.000,00
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	50	4.518.000,00	50	4.652.000,00	50	4.823.000,00	50	5.065.000,00	50	5.219.000,00
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				45.187.000,00		46.528.000,00		48.236.000,00		50.653.000,00		52.199.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	24	45.187.000,00	24	46.528.000,00	24	48.236.000,00	24	50.653.000,00	24	52.199.000,00
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				21.690.000,00		22.333.000,00		23.153.000,00		24.313.000,00		25.055.000,00
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	12	21.690.000,00	12	22.333.000,00	12	23.153.000,00	12	24.313.000,00	12	25.055.000,00
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				45.187.000,00		46.528.000,00		48.236.000,00		50.653.000,00		52.199.000,00
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	100	45.187.000,00	100	46.528.000,00	100	48.236.000,00	100	50.653.000,00	100	52.199.000,00
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				49.706.000,00		51.180.000,00		53.060.000,00		55.718.000,00		57.419.000,00
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	-	100	49.706.000,00	100	51.180.000,00	100	53.060.000,00	100	55.718.000,00	100	57.419.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				18.075.000,00		18.611.000,00		19.294.000,00		20.261.000,00		20.879.000,00
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	2	18.075.000,00	2	18.611.000,00	2	19.294.000,00	2	20.261.000,00	2	20.879.000,00
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				207.861.000,00		214.028.000,00		221.887.000,00		233.003.000,00		240.116.000,00
Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas												
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				90.375.000,00		93.056.000,00		96.473.000,00		101.306.000,00		104.399.000,00
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	-	10	90.375.000,00	10	93.056.000,00	10	96.473.000,00	10	101.306.000,00	10	104.399.000,00
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				45.187.000,00		46.528.000,00		48.236.000,00		50.653.000,00		52.199.000,00
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan	-	3	45.187.000,00	3	46.528.000,00	3	48.236.000,00	3	50.653.000,00	3	52.199.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)											
2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				27.112.000,00		27.916.000,00		28.942.000,00		30.391.000,00		31.319.000,00
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	32	27.112.000,00	32	27.916.000,00	32	28.942.000,00	32	30.391.000,00	32	31.319.000,00
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				45.187.000,00		46.528.000,00		48.236.000,00		50.653.000,00		52.199.000,00
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	30	45.187.000,00	30	46.528.000,00	30	48.236.000,00	30	50.653.000,00	30	52.199.000,00
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				21.383.641.000,00		22.017.830.000,00		22.826.354.000,00		23.969.888.000,00		24.701.660.000,00
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.328.050.000,00		7.545.383.000,00		7.822.459.000,00		8.214.342.000,00		8.465.116.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
KABUPATEN/KOTA												
Terlaksananya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	7.328.050.000,00	100	7.545.383.000,00	100	7.822.459.000,00	100	8.214.342.000,00	100	8.465.116.000,00
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.607.000,00		36.664.000,00		38.008.000,00		39.915.000,00		41.132.000,00
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengukuran kinerja instansi.												
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.807.000,00		18.336.000,00		19.007.000,00		19.962.000,00		20.570.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	17.807.000,00	2	18.336.000,00	2	19.007.000,00	2	19.962.000,00	2	20.570.000,00
2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.800.000,00		18.328.000,00		19.001.000,00		19.953.000,00		20.562.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12	17.800.000,00	12	18.328.000,00	12	19.001.000,00	12	19.953.000,00	12	20.562.000,00
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.470.647.000,00		4.603.236.000,00		4.772.273.000,00		5.011.350.000,00		5.164.340.000,00
Terbayarnya gaji dan tambahan penghasilan PNS selama 12 bulan secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai peraturan yang berlaku												
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.470.647.000,00		4.603.236.000,00		4.772.273.000,00		5.011.350.000,00		5.164.340.000,00
Tersedianya Gaji dan	Jumlah Orang yang	23	27	4.470.647.000,00	27	4.603.236.000,00	27	4.772.273.000,00	27	5.011.350.000,00	27	5.164.340.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)											
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.900.000,00		9.164.000,00		9.500.000,00		9.976.000,00		10.281.000,00
Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dengan partisipasi peserta yang sesuai target, serta meningkatnya pemahaman dan kompetensi dalam implementasi peraturan perundang-undangan												
2.14.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8.900.000,00		9.164.000,00		9.500.000,00		9.976.000,00		10.281.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	-	55	8.900.000,00	55	9.164.000,00	55	9.500.000,00	55	9.976.000,00	55	10.281.000,00
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				516.215.000,00		531.526.000,00		551.045.000,00		578.649.000,00		596.315.000,00
Tersedianya komponen listrik serta peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang lengkap dan berfungsi optimal untuk mendukung operasional instansi												
2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				44.501.000,00		45.821.000,00		47.504.000,00		49.883.000,00		51.406.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	44.501.000,00	11	45.821.000,00	11	47.504.000,00	11	49.883.000,00	11	51.406.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.504.000,00		120.464.000,00		125.512.000,00		132.651.000,00		137.220.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	3	116.504.000,00	3	120.464.000,00	3	125.512.000,00	3	132.651.000,00	3	137.220.000,00
2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				178.006.000,00		183.285.000,00		190.016.000,00		199.535.000,00		205.626.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	178.006.000,00	8	183.285.000,00	8	190.016.000,00	8	199.535.000,00	8	205.626.000,00
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.900.000,00		9.164.000,00		9.500.000,00		9.976.000,00		10.281.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	10	8.900.000,00	6	9.164.000,00	6	9.500.000,00	6	9.976.000,00	6	10.281.000,00
2.14.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				17.800.000,00		18.328.000,00		19.001.000,00		19.953.000,00		20.562.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	10	17.800.000,00	4	18.328.000,00	4	19.001.000,00	4	19.953.000,00	4	20.562.000,00
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				133.504.000,00		137.464.000,00		142.512.000,00		149.651.000,00		154.220.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	600	133.504.000,00	245	137.464.000,00	245	142.512.000,00	245	149.651.000,00	245	154.220.000,00
2.14.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan		1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)											
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.696.801.000,00		1.747.123.000,00		1.811.280.000,00		1.902.020.000,00		1.960.087.000,00
Tersedianya berbagai jasa operasional yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan												
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.398.000,00		164.125.000,00		170.152.000,00		178.676.000,00		184.131.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	9	159.398.000,00	9	164.125.000,00	9	170.152.000,00	9	178.676.000,00	9	184.131.000,00
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.537.403.000,00		1.582.998.000,00		1.641.128.000,00		1.723.344.000,00		1.775.956.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	43	7	1.537.403.000,00	7	1.582.998.000,00	7	1.641.128.000,00	7	1.723.344.000,00	7	1.775.956.000,00
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				599.880.000,00		617.670.000,00		640.353.000,00		672.432.000,00		692.961.000,00
Tersedianya fasilitas pemeliharaan yang memadai dan dapat digunakan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap optimal dan berfungsi												
2.14.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak				65.862.000,00		67.815.000,00		70.305.000,00		73.828.000,00		76.081.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	65.862.000,00	1	67.815.000,00	1	70.305.000,00	1	73.828.000,00	1	76.081.000,00
2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.504.000,00		137.464.000,00		142.512.000,00		149.651.000,00		154.220.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	133.504.000,00	8	137.464.000,00	8	142.512.000,00	8	149.651.000,00	8	154.220.000,00
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				311.511.000,00		320.749.000,00		332.528.000,00		349.186.000,00		359.847.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	311.511.000,00	3	320.749.000,00	3	332.528.000,00	3	349.186.000,00	3	359.847.000,00
2.14.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				89.003.000,00		91.642.000,00		95.008.000,00		99.767.000,00		102.813.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	89.003.000,00	9	91.642.000,00	9	95.008.000,00	9	99.767.000,00	9	102.813.000,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				570.509.000,00		587.429.000,00		609.000.000,00		639.509.000,00		659.033.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Persentase Unit Pemberi Layanan yang telah Tersosialisasi Program Bangga Kencana (%)	100	100	570.509.000,00	100	587.429.000,00	100	609.000.000,00	100	639.509.000,00	100	659.033.000,00
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				31.693.000,00		32.633.000,00		33.830.000,00		35.524.000,00		36.608.000,00
Tersosialisasinya Unit Pemberi Layanan dengan Program KKBK												
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)			0,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00
2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				31.693.000,00		27.633.000,00		28.830.000,00		30.524.000,00		31.608.000,00
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	31.693.000,00	1	27.633.000,00	1	28.830.000,00	1	30.524.000,00	1	31.608.000,00
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian				538.816.000,00		554.796.000,00		575.170.000,00		603.985.000,00		622.425.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya jumlah dokumen data												
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				46.479.000,00		47.857.000,00		49.614.000,00		52.100.000,00		53.691.000,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	18	18	46.479.000,00	18	47.857.000,00	18	49.614.000,00	18	52.100.000,00	18	53.691.000,00
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				42.253.000,00		43.506.000,00		45.104.000,00		47.364.000,00		48.810.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	-	1	42.253.000,00	1	43.506.000,00	1	45.104.000,00	1	47.364.000,00	1	48.810.000,00
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				246.423.000,00		253.731.000,00		263.049.000,00		276.227.000,00		284.660.000,00
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	18	18	246.423.000,00	18	253.731.000,00	18	263.049.000,00	18	276.227.000,00	18	284.660.000,00
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				182.535.000,00		187.949.000,00		194.851.000,00		204.612.000,00		210.859.000,00
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	182.535.000,00	12	187.949.000,00	12	194.851.000,00	12	204.612.000,00	12	210.859.000,00
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan				21.126.000,00		21.753.000,00		22.552.000,00		23.682.000,00		24.405.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Keluarga Berencana (Bangga Kencana)												
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	-	1	21.126.000,00	1	21.753.000,00	1	22.552.000,00	1	23.682.000,00	1	24.405.000,00
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.374.236.000,00		4.503.965.000,00		4.669.357.000,00		4.903.278.000,00		5.052.969.000,00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana [KB]	persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI (%)	21	21	4.374.236.000,00	21	4.503.965.000,00	21	4.669.357.000,00	21	4.903.278.000,00	21	5.052.969.000,00
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	67,56	67,56		67,56		67,56		67,56		67,56	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				826.020.000,00		850.518.000,00		881.749.000,00		925.921.000,00		954.190.000,00
Terfasilitasinya Balai Penyuluh												
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				320.437.000,00		329.940.000,00		342.056.000,00		359.192.000,00		370.158.000,00
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	18	18	320.437.000,00	18	329.940.000,00	18	342.056.000,00	18	359.192.000,00	18	370.158.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				256.349.000,00		263.952.000,00		273.645.000,00		287.354.000,00		296.126.000,00
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	18	18	256.349.000,00	18	263.952.000,00	18	273.645.000,00	18	287.354.000,00	18	296.126.000,00
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				71.214.000,00		73.326.000,00		76.017.000,00		79.824.000,00		82.263.000,00
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	18	18	71.214.000,00	18	73.326.000,00	18	76.017.000,00	18	79.824.000,00	18	82.263.000,00
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				178.020.000,00		183.300.000,00		190.031.000,00		199.551.000,00		205.643.000,00
Terlaksananya Advokasi	Jumlah Organisasi yang	32	32	178.020.000,00	32	183.300.000,00	32	190.031.000,00	32	199.551.000,00	32	205.643.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)											
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				870.172.000,00		895.979.000,00		928.881.000,00		975.415.000,00		1.005.193.000,00
Terfasilitasnya Balai Penyuluh												
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				870.172.000,00		895.979.000,00		928.881.000,00		975.415.000,00		1.005.193.000,00
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	356	356	870.172.000,00	356	895.979.000,00	356	928.881.000,00	356	975.415.000,00	356	1.005.193.000,00
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2.179.586.000,00		2.244.227.000,00		2.326.639.000,00		2.443.198.000,00		2.517.785.000,00
Meningkatnya akseptor MKJP yang dilayani												
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				60.327.000,00		62.116.000,00		64.397.000,00		67.624.000,00		69.688.000,00
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	-	18	60.327.000,00	18	62.116.000,00	18	64.397.000,00	18	67.624.000,00	18	69.688.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)											
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1.500.111.000,00		1.544.600.000,00		1.601.320.000,00		1.681.542.000,00		1.732.877.000,00
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	5.019	2.5	1.500.111.000,00	2.5	1.544.600.000,00	2.75	1.601.320.000,00	3	1.681.542.000,00	3.25	1.732.877.000,00
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				607.720.000,00		625.744.000,00		648.722.000,00		681.221.000,00		702.018.000,00
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	18	18	607.720.000,00	18	625.744.000,00	18	648.722.000,00	18	681.221.000,00	18	702.018.000,00
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				11.428.000,00		11.767.000,00		12.200.000,00		12.811.000,00		13.202.000,00
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	-	55	11.428.000,00	55	11.767.000,00	55	12.200.000,00	55	12.811.000,00	55	13.202.000,00
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												
Meningkatnya Kampung KB yg berkontribusi terhadap	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas	0,28	35	498.458.000,00	38	513.241.000,00	42	532.088.000,00	45	558.744.000,00	47	575.801.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
pembangunan di wilayahnya	mandiri											
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				493.458.000,00		508.241.000,00		527.088.000,00		553.744.000,00		570.801.000,00
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	120	190	493.458.000,00	356	508.241.000,00	356	527.088.000,00	356	553.744.000,00	356	570.801.000,00
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				9.110.846.000,00		9.381.053.000,00		9.725.538.000,00		10.212.759.000,00		10.524.542.000,00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak (%)	0,48	0,48	9.110.846.000,00	0,48	9.381.053.000,00	0,48	9.725.538.000,00	0,48	10.212.759.000,00	0,48	10.524.542.000,00
	Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak (%)	15	15		16		17		18		19	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	8	7,70		7,55		7,4		7,2		7	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.											
Terfasilitasinya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	7	7	1674496000	7	1724157000	7	1787471000	7	1877018000	7	1934321000
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				53.550.000,00		55.138.000,00		57.163.000,00		60.026.000,00		61.859.000,00
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	5	5	53.550.000,00	5	55.138.000,00	5	57.163.000,00	5	60.026.000,00	5	61.859.000,00
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan				474.861.000,00		488.944.000,00		506.899.000,00		532.293.000,00		548.543.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Keluarga Akseptor (UPPKA))												
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	5	18	474.861.000,00	54	488.944.000,00	54	506.899.000,00	54	532.293.000,00	54	548.543.000,00
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				145.023.000,00		149.324.000,00		154.807.000,00		162.563.000,00		167.526.000,00
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	18	18	145.023.000,00	18	149.324.000,00	18	154.807.000,00	18	162.563.000,00	18	167.526.000,00
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				996.062.000,00		1.025.751.000,00		1.063.602.000,00		1.117.136.000,00		1.151.393.000,00
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.92	2.92	996.062.000,00	2.92	1.025.751.000,00	2.92	1.063.602.000,00	2.92	1.117.136.000,00	2.92	1.151.393.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)											
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui				7.436.350.000,00	356	7.656.896.000,00	356	7.938.067.000,00	356	8.335.741.000,00	356	8.590.221.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
Terfasilitasinya desa dan kelurahan dengan TPK dan akses internet mobile	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile	356	356	7.436.350.000,00	356	7.656.896.000,00	356	7.938.067.000,00	356	8.335.741.000,00	356	8.590.221.000,00
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				3.380.159.000,00		3.480.407.000,00		3.608.212.000,00		3.788.973.000,00		3.904.646.000,00
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	18	18	3.380.159.000,00	18	3.480.407.000,00	18	3.608.212.000,00	18	3.788.973.000,00	18	3.904.646.000,00
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				4.056.191.000,00		4.176.489.000,00		4.329.855.000,00		4.546.768.000,00		4.685.575.000,00
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	18	18	4.056.191.000,00	18	4.176.489.000,00	18	4.329.855.000,00	18	4.546.768.000,00	18	4.685.575.000,00

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD tahun 2030-2034

4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Nawakarsa			Nomenklatur Program Pembangunan	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Navigasi	No	Sub Navigasi					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable		Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.14.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	17000000	1	17000000	1	17000000	1	17000000	1	17000000

No	Program Prioritas Nawakarsa				Nomenklatur Program Pembangunan	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Navigasi	No	Sub Navigasi						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)														
			Gresik Rembug Akur	Memban gun pemerin tahan yang kolabora tif dengan terus bertemu dengan masyara kat	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksana nya dukungan terhadap pelaksanaa n urusan pemerintahan	2.14.01.2.01 - Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	35,607,000	2	36,664,000	2	38,008,000	2	39,915,000	2	41,132,000

No	Program Prioritas Nawakarsa				Nomenklatur Program Pembangunan	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Navigasi	No	Sub Navigasi						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.														
			Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Usaha dan Pendidikan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	540	152.592.000,00	540	157.118.000,00	540	162.888.000,00	540	171.048.000,00	540	176.270.000,00
			Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten Gresik	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	150	26.639.000,00	150	27.574.000,00	150	28.772.000,00	150	30.461.000,00	150	31.547.000,00

No	Program Prioritas Nawakarsa				Nomenklatur Program Pembangunan	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Navigasi	No	Sub Navigasi						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
						perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota										

4.4. Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Tabel 4.4. Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
Prioritas Nasional 4												
Pencegahan dan penurunan stunting												
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	18	474.861.000,000	54	488.944.000,000	54	506.899.000,000	54	532.293.000,000	54	548.543.000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	18	474.861.000,000	54	488.944.000,000	54	506.899.000,000	54	532.293.000,000	54	548.543.000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	18	145.023.000,00	18	149.324.000,00	18	154.807.000,00	18	162.563.000,00	18	167.526.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	2.92	996.062.000,00	2.92	1.025.751.000,00	2.92	1.063.602.000,00	2.92	1.117.136.000,00	2.92	1.151.393.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	18	320.437.000,00	18	329.940.000,00	18	342.056.000,00	18	359.192.000,00	18	370.158.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
	Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal											
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	18	256.349.000,00	18	263.952.000,00	18	273.645.000,00	18	287.354.000,00	18	296.126.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	18	71.214.000,00	18	73.326.000,00	18	76.017.000,00	18	79.824.000,00	18	82.263.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32	178.020.000,00	32	183.300.000,00	32	190.031.000,00	32	199.551.000,00	32	205.643.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	190	493.458.000,00	356	508.241.000,00	356	527.088.000,00	356	553.744.000,00	356	570.801.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	356	870.172.000,00	356	895.979.000,00	356	928.881.000,00	356	975.415.000,00	356	1.005.193.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18	60.327.000,00	18	62.116.000,00	18	64.397.000,00	18	67.624.000,00	18	69.688.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.5	1.500.111.000,00	2.5	1.544.600.000,00	2.75	1.601.320.000,00	3	1.681.542.000,00	3.25	1.732.877.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	18	607.720.000,00	18	625.744.000,00	18	648.722.000,00	18	681.221.000,00	18	702.018.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55	11.428.000,00	55	11.767.000,00	55	12.200.000,00	55	12.811.000,00	55	13.202.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	46	15.345.700,00	46	15.949.100,00	46	16.718.000,00	46	17.806.500,00	46	18.502.700,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	31.693.000,00	1	27.633.000,00	1	28.830.000,00	1	30.524.000,00	1	31.608.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
	Kuantitas Penduduk											
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	18	46.479.000,00	18	47.857.000,00	18	49.614.000,00	18	52.100.000,00	18	53.691.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1	42.253.000,00	1	43.506.000,00	1	45.104.000,00	1	47.364.000,00	1	48.810.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	18	246.423.000,00	18	253.731.000,00	18	263.049.000,00	18	276.227.000,00	18	284.660.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	182.535.000,00	12	187.949.000,00	12	194.851.000,00	12	204.612.000,00	12	210.859.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	21.126.000,00	1	21.753.000,00	1	22.552.000,00	1	23.682.000,00	1	24.405.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27	4.470.647.000,00	27	4.603.236.000,00	27	4.772.273.000,00	27	5.011.350.000,00	27	5.164.340.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	159.398.000,00	9	164.125.000,00	9	170.152.000,00	9	178.676.000,00	9	184.131.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	1.537.403.000,00	7	1.582.998.000,00	7	1.641.128.000,00	7	1.723.344.000,00	7	1.775.956.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17.807.000,00	2	18.336.000,00	2	19.007.000,00	2	19.962.000,00	2	20.570.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	17.800.000,00	12	18.328.000,00	12	19.001.000,00	12	19.953.000,00	12	20.562.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	10	121.001.000,00	18	124.590.000,00	18	129.164.000,00	18	135.633.000,00	18	139.774.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	42.128.000,00	3	43.377.000,00	3	44.970.000,00	3	47.223.000,00	3	48.665.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	18	7.436.350.000,00	18	7.656.896.000,00	18	7.938.067.000,00	18	8.335.741.000,00	18	8.590.221.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	18	4.056.191.000,00	18	4.176.489.000,00	18	4.329.855.000,00	18	4.546.768.000,00	18	4.685.575.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110	3.681.000,00	110	3.791.000,00	110	3.930.000,00	110	4.127.000,00	110	4.253.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3.681.000,00	1	3.791.000,00	1	3.930.000,00	1	4.127.000,00	1	4.253.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	44	3.681.000,00	44	3.791.000,00	44	3.930.000,00	44	4.127.000,00	44	4.253.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	25.776.000,00	36	26.538.000,00	18	27.513.000,00	18	28.891.000,00	18	29.773.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	17	35.605.000,00	36	36.660.000,00	36	38.007.000,00	36	39.911.000,00	36	41.129.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	540	152.592.000,000	540	157.118.000,000	540	162.888.000,000	540	171.048.000,000	540	176.270.000,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	510	15.260.200,00	510	15.713.300,00	510	16.289.100,00	510	17.105.500,00	510	17.628.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
	Kabupaten/Kota											
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	3	29.788.100,00	21	30.671.600,00	21	31.797.900,00	21	33.391.000,00	21	34.410.300,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	90	92.994.200,00	90	95.752.000,00	90	99.225.000,00	90	104.241.300,00	90	107.423.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	90	103.326.800,00	90	106.391.000,00	90	110.341.000,00	90	115.823.700,00	90	119.359.500,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	3	45.187.000,00	3	46.528.000,00	3	48.236.000,00	3	50.653.000,00	3	52.199.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	10	90.375.000,00	10	93.056.000,00	10	96.473.000,00	10	101.306.000,00	10	104.399.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32	27.112.000,00	32	27.916.000,00	32	28.942.000,00	32	30.391.000,00	32	31.319.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	30	45.187.000,00	30	46.528.000,00	30	48.236.000,00	30	50.653.000,00	30	52.199.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	150	26.639.000,00	150	27.574.000,00	150	28.772.000,00	150	30.461.000,00	150	31.547.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	24	45.187.000,00	24	46.528.000,00	24	48.236.000,00	24	50.653.000,00	24	52.199.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	100	49.706.000,00	100	51.180.000,00	100	53.060.000,00	100	55.718.000,00	100	57.419.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	50	4.518.000,00	50	4.652.000,00	50	4.823.000,00	50	5.065.000,00	50	5.219.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
	Kabupaten/Kota											
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	100	45.187.000,00	100	46.528.000,00	100	48.236.000,00	100	50.653.000,00	100	52.199.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	24	32.535.000,00	24	33.500.000,00	24	34.730.000,00	24	36.470.000,00	24	37.583.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	12	21.690.000,00	12	22.333.000,00	12	23.153.000,00	12	24.313.000,00	12	25.055.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	18.075.000,00	2	18.611.000,00	2	19.294.000,00	2	20.261.000,00	2	20.879.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	95	61.680.000,00	95	63.509.000,00	95	65.841.000,00	95	69.140.000,00	95	71.251.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	100	42.128.000,00	100	43.377.000,00	100	44.970.000,00	100	47.223.000,00	100	48.665.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
	Daerah Kabupaten/Kota											
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	100	125.997.000,00	100	129.734.000,00	100	134.498.000,00	100	141.236.000,00	100	145.547.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	150	8.846.000,00	150	9.109.000,00	150	9.443.000,00	150	9.916.000,00	150	10.219.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	24	14.042.000,00	24	14.459.000,00	24	14.990.000,00	24	15.741.000,00	24	16.221.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	50	1.404.000,00	50	1.445.000,00	50	1.499.000,00	50	1.574.000,00	50	1.622.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	100	5.897.000,00	100	6.072.000,00	100	6.295.000,00	100	6.611.000,00	100	6.813.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	24	10.110.000,00	24	10.410.000,00	24	10.792.000,00	24	11.333.000,00	24	11.679.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target									
			2026	Anggaran	2027	Anggaran	2028	Anggaran	2029	Anggaran	2030	Anggaran
	Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	12	5.617.000,00	12	5.783.000,00	12	5.996.000,00	12	6.296.000,00	12	6.488.000,00

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dukungan Proyek Strategis Nasional											
DINAS KBPPPA											
Proyek Prioritas Nasional / Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Tidak Terdapat Proyek Strategis Nasional											

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat DaerahTarget Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD
Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat DaerahTarget Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Asta Cita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas										
Outcome Prioritas : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif										
koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	3	45.187.000,00	3	46.528.000,00	3	48.236.000,00	3	50.653.000,00	3	52.199.000,00
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	10	90.375.000,00	10	93.056.000,00	10	96.473.000,00	10	101.306.000,00	10	104.399.000,00
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32	27.112.000,00	32	27.916.000,00	32	28.942.000,00	32	30.391.000,00	32	31.319.000,00
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	30	45.187.000,00	30	46.528.000,00	30	48.236.000,00	30	50.653.000,00	30	52.199.000,00
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	150	26.639.000,00	150	27.574.000,00	150	28.772.000,00	150	30.461.000,00	150	31.547.000,00
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	24	45.187.000,00	24	46.528.000,00	24	48.236.000,00	24	50.653.000,00	24	52.199.000,00
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	100	49.706.000,00	100	51.180.000,00	100	53.060.000,00	100	55.718.000,00	100	57.419.000,00
layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	50	4.518.000,00	50	4.652.000,00	50	4.823.000,00	50	5.065.000,00	50	5.219.000,00
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	100	45.187.000,00	100	46.528.000,00	100	48.236.000,00	100	50.653.000,00	100	52.199.000,00
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	24	32.535.000,00	24	33.500.000,00	24	34.730.000,00	24	36.470.000,00	24	37.583.000,00
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	12	21.690.000,00	12	22.333.000,00	12	23.153.000,00	12	24.313.000,00	12	25.055.000,00
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	18.075.000,00	2	18.611.000,00	2	19.294.000,00	2	20.261.000,00	2	20.879.000,00
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110	3.681.000,00	110	3.791.000,00	110	3.930.000,00	110	4.127.000,00	110	4.253.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3.681.000,00	1	3.791.000,00	1	3.930.000,00	1	4.127.000,00	1	4.253.000,00
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	44	3.681.000,00	44	3.791.000,00	44	3.930.000,00	44	4.127.000,00	44	4.253.000,00
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	25.776.000,00	36	26.538.000,00	18	27.513.000,00	18	28.891.000,00	18	29.773.000,00
(MASUKKAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG MASUK										

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
PADA PROGRAM PRIORITAS)										
Outcome Prioritas : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan										
Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	17	35.605.000,00	36	36.660.000,00	36	38.007.000,00	36	39.911.000,00	36	41.129.000,00
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	510	15.260.200,00	510	15.713.300,00	510	16.289.100,00	510	17.105.500,00	510	17.628.000,00
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	3	29.788.100,00	21	30.671.600,00	21	31.797.900,00	21	33.391.000,00	21	34.410.300,00
Outcome Prioritas : Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat										
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	540	152.592.000,000	540	157.118.000,000	540	162.888.000,000	540	171.048.000,000	540	176.270.000,000

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 –2030

Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 –2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84
3	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	71,57	71.62-72	71.67-72.50	71.72-73	71.77-73.50	71.82-74	71.87-74.50
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks (Skala 0-100)	70,13	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.407	0.402	0.380	0.369	0.358	0.347	0.336
6	Indeks Kemiskinan Multidimensi	%	48,87	48	46	44	42	40	38
7	Indeks inklusi (GEDSI)	Indeks	56,2	60	64	68	72	76	80
8	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	%	10	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
9	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,72	66,72	67,72	68,72	69,72	70,72	71,72
10	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	Rasio	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
11	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,18	9,17	9,16	9,15	9,14	9,13	9,12
12	Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	%	9,27	9,27	9,07	8,87	8,67	8,47	8,27
14	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	%	40	30	40	40	40	40	40
15	Total Fertility Rate	Kelahiran	1,92	1.92-2	1.92-2	1.92-2	1.92-2	1.92-2	1.92-2
16	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender	%	30,43	30	40	50	60	80	100
17	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	%	9	9	9	9	9	8	8
18	Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Konprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah, visi dan misi kepala daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, berdaya saing, setara, dan inklusif.

Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta acuan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, efektif, dan terukur. Pelaksanaan Renstra memerlukan sinergi lintas sektor, kolaborasi multipihak, serta partisipasi aktif masyarakat agar seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, Dinas diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berdaya.

Demikian Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dan komitmen bersama seluruh jajaran Dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Gresik, 11 September 2025
Kepala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik



dr. Titik Ernawati, M.H.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19760903 200701 2 010